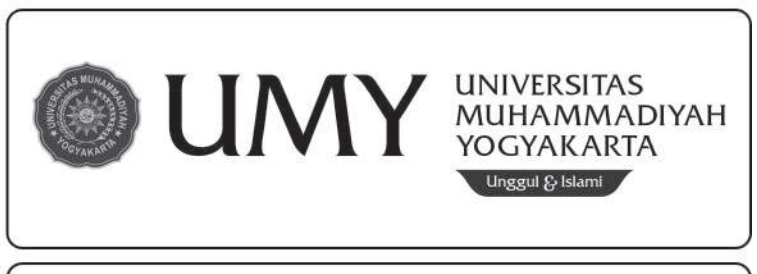

FASILITASI KEMUDAHAN MEMBAYAR IURAN SPAMDUS

Bank BPD DIY Hadirkan QUAT

WONOSARI (KR) - PT Bank BPD DIY menyerahkan QRIS Ultimate Automated Transcaction (QUAT) aplikasi untuk pembayaran Spamdus Tirtajati di Dusun Jatibungkus, Hargomulyo, Gedangsari, Kamis (17/12). Aplikasi QUAT BPD DIY ini sarana mendukung pembayaran rekening spamdus secara nontunai, atau melalui mobile banking Bank BPD DIY. Kedatangan Tim Percepatan Implementasi QUAT PT Bank BPD DIY Cabang Wonosari Bambang Supriyadi, Muiz Syaichurohman dan Agustin Guritno disambut Dukuh Jatibungkus Gunawan dan warga.

"Melalui QUAT BPD DIY pembayaran spamdus yang semula dilakukan secara tunai, akan menjadi lebih mudah, karena pembayarannya dapat dilakukan melalui aplikasi mobile banking Bank BPD DIY,"

KR-Dedy EW

Bambang Supriyadi menyerahkan QUAT.

kata Bambang Supriyadi.

Penyerahan layanan QUAT yang merupakan QR Code yang telah terstandarisasi secara nasional sebagai bentuk upaya untuk mendorong digitalisasi perbankan sekaligus sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka HUT ke- 59 PT Bank BPD DIY. Sebelumnya Bank BPD DIY telah membantu pembuatan sumur bor di Dusun Jatibungkus. Kini telah dikelola secara mandiri oleh masyarakat, sehingga dengan adanya dukungan pembayaran secara online akan memudahkan transaksi pembayaran rekening air.

Dukuh Jatibungkus Gunawan menyampaikan terimakasih atas kepedulian Bank BPD DIY, karena pemanfaatan sumur bor kini dapat mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat. Termasuk dengan adanya layanan pembayaran melalui QUAT maupun mobile banking, nantinya akan mendorong masyarakat untuk lebih memahami teknologi. **(Ded)-f**

Kuasa . . . . . Sambungan hal 1

Berbeda dibanding kritik. Jika masyarakat melakukan hujatan, caci maki, dan umpatan dengan kata-kata kotor dan kasar, jelas hal tersebut bukan pada tempatnya. Apalagi berbagai aktivitas yang membahayakan masyarakat luas, hal itu memerlukan fungsi kekuasaan pemerintah untuk mengamankannya.

Sebagai misal, mengaitkan penghapusan atau peniadaan program di televisi, sebagai kehendak kekuasaan politik pusat, mungkin terlalu jauh. Apalagi, sangat jarang dan sulit dibuktikan, pemerintah takut, apalagi jatuh, karena berbagai aktivitas kritik sekritis apapun. Televisi, apalagi sebagai lembaga komersial, pengadaan dan penghapusan program/acara itu lebih mempertimbangkan kehendak dan aspirasi pasar. Dalam hal ini biasa disebut sebagai kuasa pasar.

Akan tetapi, kuasa pasar sebenarnya tidak sedangkal itu. Di ujung kekuasaan Soeharto, ketika ketidaksukaan masyarakat Indonesia semakin menggumpal, ketidaksukaan itu ditangkap pasar internasional. Kuasa pasar internasional ikut membantu dan mengonsolidasikan kekuatan-kekuatan internal dalam masyarakat Indonesia. Soeharto juga tahu bahwa kuasa pasar internasional mulai tidak menghendakinya. Bukan kritik yang menjatuhkan Soeharto, tetapi rasa tidak nyaman dan tidak bahagia ketika kekerasan mulai terjadi di mana-mana. Kekerasan yang dikehendaki kuasa pasar internasional.

Kita loncat ketika SBY berkuasa. Kurang apa SBY dikritik, dan bahkan dihujat, dalam berbagai forum dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Terdapat sejumlah kegiatan dan aktivitas kenegaraan dan kemasyarakatan yang silih hilang berganti. Akan tetapi, tidak terlihat kuasa pasar internasional (dalam hal ini kekuatan Amerika dan sekutunya) tidak menyukai SBY.

Tentu sekarang, periode kekuasaan Jokowi, periode kedua, ketika peran, fungsi, dan keberadaan media sosial semakin besar dan sangat penting, kekuasaan Jokowi menjadi terlihat lebih transparan. Apalagi, tampaknya, kiblat pasar internasional era Jokowi berbeda dengan masa-masa kuasa pasar sebelumnya. Hal ini tentu saja menimbulkan bangkitnya peluang perlawanan kuasa pasar internasional lainnya.

Berbagai kekuatan kelompok kepentingan, sebagai jejak-sisa persaingan masa lalu, semakin mendapat kesempatan untuk berkonsolidasi dengan kekuatan pasar Amerika dan sekutunya. Di balik itu, tentu ada bumbu-bumbu persaingan idelogis, termasuk persaingan agama antara kekuatan Islam, Kristen, Katholik, khususnya. Sulit menolak jika kenyataan tersebut secara laten masih berlangsung.

Aspirasi pasar internal di Indonesia, semakin memperlihatkan cabang-cabang yang menimbulkan persaingan menjadi tajam. Di satu sisi mendapat akomodasi dalam kiblat yang dikomandani China dengan sekutunya. Di sisi lain, kekuatan kuasa pasar internasional yang didominasi kekuatan Amerika.

Kini, Indonesia masuk ke dalam arena pertarungan kuasa pasar internasional yang semakin teridentifikasi. Berbagai kekuatan bertarung dalam berbagai cara, termasuk dengan memanfaatkan sebagian masyarakat dalam posisi ambang dan tidak jelas, baik dalam posisi ekonomi, politik, bahkan ideologis. Tokoh-tokoh perlawanan muncul ke permukaan. Akan tetapi, sayangnya, tidak dilihat bahwa tokoh-tokoh tersebut hanya boneka pasar internasional.

(Penulis adalah Kepala Pusat Studi Kebudayaan UGM)-d

DPRD KABUPATEN BANTUL

Mimbar Legislatif

Jl. Jend. Sudirman, Bejen, Bantul, Kecamatan Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

RAIH TERBAIK I KETERBUKAAN PUBLIK

DPRD Bantul Siap Terima Masukan Warga

BANTUL (KR) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul menerima penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY sebagai terbaik I Kategori Lembaga Legislatif DIY dari Komisi Informasi Daerah (KID) DIY. Anugerah ini diberikan karena DPRD Bantul dianggap mampu menyajikan informasi kepada masyarakat secara terbuka.

Ketua DPRD Bantul, Hanung Rahardjo ST kepada *KR*, Jumat (18/12), menuturkan pihaknya mengapresiasi dan berbangga atas pencapaian prestasi tersebut. Ia berkomitmen keterbukaan informasi sebagai bentuk bagian dari pelayanan sebagai wakil rakyat."Kami siap menerima masukan dari masyarakat yang berkaitan dengan tupoksi ketugasan kami," tegas Hanung.

Ditambahkannya DPRD Bantul selalu berupaya apapun kegiatan yang dilakukan DPRD selalu dapat diketahui publik. Termasuk hasil pekerjaan berupa produk hukum juga wajib diketahui masyarakat. Bahkan masyarakat dapat memberi masukan sesuai dengan tupoksi dan ketugasan DPRD sebagai wakil rakyat.

KR-Rahajeng Pramesi

Hanung Rahardjo ST

Pihaknya juga berharap dalam keterbukaan informasi ini juga menjadi jalan untuk pihaknya melakukan sosialisasi program kegiatan serta produk hukum. Bahkan pihaknya berharap dengan keterbukaan informasi mudah juga bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi dan menerima masukan masyarakat.

"Kami memiliki berbagai macam cara untuk sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat. Kami memiliki *website*, majalah bahkan menciptakan hubungan yang harmonis dengan rekan media untuk saling tukar informasi," tambahnya lagi.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bantul, Prapta Nugraha SSos MH menambahkan Sekwan DPRD Bantul berusaha keras untuk bersinergi dengan anggota DPRD mewujudkan kemudahan akses dalam hal keterbukaan informasi publik. Selain akses *website*, majalah dan kerja sama antarmedia yang sinergis beberapa hal yang diusahakan sekwan seperti penyediaan ruangan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang representatif sehingga memudahkan akses kecepatan memberikan pelayanan informasi. **(Aje)-d**

KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Penganugerahan
Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2020

DPRD KABUPATEN BANTUL

Kategori Lembaga Legislatif Se-DIY Sebagai :

TERBAIK I

Yogyakarta, 10 Desember 2020
Ketua

H. Moh. Hasyim,S.H.,M.Hum

KR-Rahajeng Pramesi

Piagam penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY yang diberikan kepada DPRD Bantul.